

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP / SKIPM ACEH

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan ini untuk menyajikan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tahun 2024 dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta berdasarkan perkembangan indikator yang ada.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu sarana akuntabilitas dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan seluruh jajaran dalam rangka memacu kinerja lebih baik ke depan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.

Aceh Besar, 20 Januari 2025

Kepala SKIPM Aceh,




Diky Agung Setiawan S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
i Daftar Isi.....	3
ii Daftar Gambar.....	4
iv Daftar Tabel...	5
v Ringkasan Eksekutif	6
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Sasaran Strategis Tahun 2024.....	11
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Pengukuran Kinerja	15
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	18
3.3. Anggaran	69
3.4. Sumber Daya Manusia	71
BAB IV. PENUTUP	73
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Tahun 2024.....	10
Gambar 2.	Sasaran Strategis Tahun 2024	11
Gambar 3.	Sasaran Kinerja Tahun 2024 Dalam Aplikasi Kinerja	16
Gambar 4.	Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2024.....	16
Gambar 5.	<i>Capture</i> Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2024.....	17
Gambar 6.	Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal Tahun 2024.....	21
Gambar 7.	Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di UPI Tahun 2024.....	27
Gambar 8.	Kegiatan Monitoring Penjaminan Mutu Perikanan Domestik di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	29
Gambar 9.	Kegiatan <i>Re-akreditasi</i> Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 di SKIPM Aceh Tahun 2024.....	36
Gambar 10.	<i>Capture</i> Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2024	40
Gambar 11.	<i>Capture</i> Nilai IP ASN SKIPM Aceh Tahun 2024	43
Gambar 12.	<i>Capture</i> Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh Pada Kinerjaku KKP Tahun 2024.....	50
Gambar 13.	<i>Capture</i> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Aceh Pada Aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2024.....	53
Gambar 14.	<i>Capture</i> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Aceh Pada Aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2024	57
Gambar 15.	<i>Capture</i> Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2024	62
Gambar 16.	Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2024	69
Gambar 17.	Komposisi Alokasi, Realisasi, Nilai Kinerja dan Partisipasi Satuan Kerja Tahun 2024..	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	12
Tabel 2.	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel 3.	Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2024.....	19
Tabel 4.	Data Sertifikat CPIB Kapal Tahun 2024.....	21
Tabel 5.	Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2024	24
Tabel 6.	Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk) SKIPM Aceh Tahun 2024	24
Tabel 7.	Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk SKIPM Aceh Tahun 2024	25
Tabel 8.	Data Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) SKIPM Aceh Tahun 2024	25
Tabel 9.	Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2024	30
Tabel 10.	Data Jumlah Sertifikasi Ekspor Tahun 2024.....	32
Tabel 11.	Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2024.....	33
Tabel 12.	Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2024.....	37
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2024	41
Tabel 14.	Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2024.....	43
Tabel 15.	Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Lingkup BPPMHKP Pada Tahun 2024.....	47
Tabel 16.	Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2024.....	47
Tabel 17.	Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2024	49
Tabel 18.	Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2024.....	53
Tabel 19.	Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2024	57
Tabel 20.	Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2024	59
Tabel 21.	Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2024	62
Tabel 22.	Target dan Realisasi IKS 03.09 Tahun 2024.....	65
Tabel 23.	Target dan Realisasi IKS 03.10 Tahun 2024.....	67
Tabel 24.	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	71
Tabel 25.	Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Pada periode triwulan IV terdapat perubahan dokumen perjanjian kinerja SKIPM Aceh berdasarkan cascading kinerja unit eselon I BPPMHKP. Hal ini sesuai dengan perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Manajemen Mutu;
- c. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- d. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2024, seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Aceh hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 114, 61 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjajaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 15 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir. Nilai NPSS tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Aceh sampai akhir periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan 2024 sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 100 %.
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan 2024 sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 106,66 %.
 - c. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan 2024 sebesar 70 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 100 %.

- d. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh target tahunan 2024 sebesar 99 % sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan IV telah tercapai sebesar 100 %.
2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dapat tercapai melebihi target sebesar 83,10 % dari target 70 %.
3. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 3,36 telah tercapai sebesar 3,66 yang setara dengan persentase 108,93 %;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 86 telah tercapai sebesar 91,94 yang setara dengan persentase 106,91 %;
 - c. Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 75 telah tercapai sebesar 81,98 yang setara dengan persentase 109,31 %;
 - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 82 telah tercapai sebesar 85,50 yang setara dengan persentase 104,27 %;
 - e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 71 telah tercapai sebesar 92,50 yang setara dengan persentase 120 %;
 - f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 93,76 telah tercapai sebesar 98,41 atau sebesar yang setara dengan persentase 104,96 %;
 - g. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 100 % telah tercapai sebesar 100 % atau sebesar yang setara dengan persentase 100 %;
 - h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 80 % telah tercapai sebesar 100 % atau sebesar yang setara dengan persentase 120 %;
 - i. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 80 % telah tercapai sebesar 84,34 % atau sebesar yang setara dengan persentase 105,43 %;
 - j. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dari target sebesar 80 % telah tercapai sebesar 97,50 % atau sebesar yang setara dengan persentase 120 %;

Realisasi anggaran Stasiun KIPM Aceh sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 5.088.935.747,- atau mencapai 99.91 % dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp. 5.093.642,000, . Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil evaluasi tersebut dapat memberikan gambaran variabel dan kriteria dalam penerapan manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pada saat ini transformasi BPPMHKP masih dalam proses hingga ke seluruh UPT di Indonesia. Diharapkan seluruh proses perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat segera selesai sehingga berdampak pada kegiatan yang transformatif dan inovatif untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan terus berkembang.

Dalam rangka mendukung visi BPPMHKP yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Stasiun KIPM Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2024 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2024 SKIPM Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi SKIPM Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1. sebagai berikut.

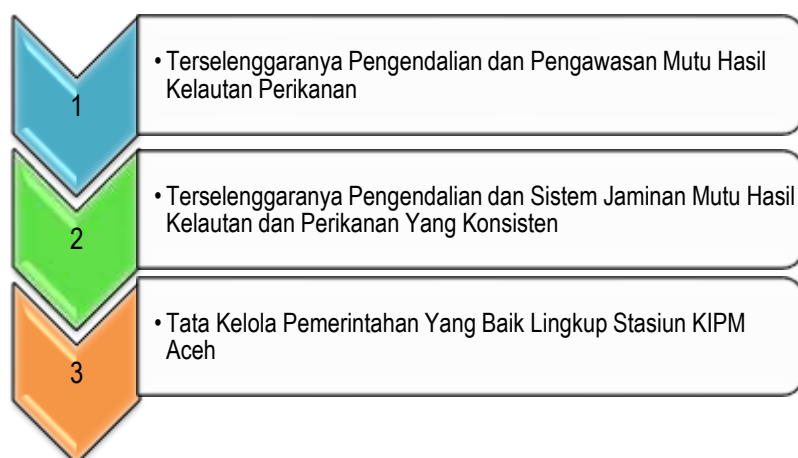
Gambar 1. Struktur Organisasi Tahun 2024



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis Tahun 2024

Gambar 2. Sasaran Strategis Tahun 2024



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 disusun secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana Kinerja SKIPM Aceh Tahun Anggaran 2024 diimplementasikan dalam Penetapan Target Kinerja Tahun 2024. Terdapat perubahan atau revisi dokumen kinerja yang ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024. Dimana pada dokumen perjanjian kinerja sebelumnya SKIPM Aceh mempunyai 16 indikator kinerja, menjadi 15 indikator kinerja. Target kinerja SKIPM Aceh yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya dan dirinci ke dalam masing-masing indikator kinerja terbaru dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		3.	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5.	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	86
		8.	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai).	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	82
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	71
		11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	93,76
		12.	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	100

		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80

Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET / TAHUN	TARGET TW IV / TAHUN 2024	CAPAIAN SD TW IV / TAHUN 2024
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	70	100
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	70	106,66
		3.	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	70	100
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	99	99	100
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5.	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	70	83,10
SK 3	Terselenggaranya Tata Kelola Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	3,36	3,36	3,66
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	86	86	91,94
		8.	Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai).	75	75	81,98
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	82	82	85,50
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	71	71	92,50
		11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	93,76	93,76	98,41
		12.	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	100	100	100
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80	80	100
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80	80	83,34
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80	80	97,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Akuntabilitas kinerja organisasi BPPMHKP merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkup eselon I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BPPMHKP, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3. Sasaran Kinerja Tahun 2024 Dalam Aplikasi Kinerja

No	Kode	Sasaran	Status	Aksi
1	S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Digunakan	
2	S.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	Digunakan	
3	S.03	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh	Digunakan	

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2024)

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2024



(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2024)

Sampai periode akhir tahun 2024, unit kerja SKIPM Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO) September sebesar 114,61. Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terpotret melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 15 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. Capture Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2024

NKO Desember - 2024												
Unit Kerja : STASDAH KPM Aceh												
Skor Kinerja : 114.61												
• Pastikan pada data dukung sudah terupload semua ✓ • Jika masih terdapat tanda ✖, silakan No. urut di update kembali, dengan cara klik tombol • Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat diuploadkan dengan cara klik tombol Tambah Data Dukung												
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator	Perkembangan	Tanggal 2024	Tanggal Desember	Capaian Desember	%	Tanggal Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
5.01	Terlengkapannya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						115,26			115,26		
IKS.01.01	Pemantauan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Perairan Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	70.00	70.00	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	03-Jan-2025 08:35
	Tambah Data Dukung											
IKS.01.02	Pemantauan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Perairan Perairan Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	70.00	70.00	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	03-Jan-2025 08:35
	Tambah Data Dukung											
IKS.01.03	Pemantauan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasion KPM	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	70.00	70.00	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	03-Jan-2025 08:35
	Tambah Data Dukung											
IKS.01.04	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	80.00	80.00	100.00	101.01	80.00	100.00	101.01	03-Jan-2025 08:35
	Tambah Data Dukung											
5.02	Terlengkapannya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Komersial Sesuai Standar						108,71			108,71		
IKS.02.01	Nilai Pemenuhan Pemangan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengul dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	70.00	70.00	83.10	100,71	70.00	83.11	108,71	03-Jan-2025 08:35
	Tambah Data Dukung											
5.03	Terlengkapannya Tapa Kelola Pemenuhan Yang Baik Lingkup Stasion KPM Aceh						100,00			100,00		
IKS.03.01	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasion KPM Aceh	Indeks	Maximize	Nilai Positif Abstr	3.30	3.30	3.00	100,00	3.30	3.00	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.02	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	Indeks	Maximize	Nilai Positif Abstr	80.00	80.00	81.94	100,00	80.00	81.94	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.03	Nilai Minimal Yang Diperseorok Untuk Pembiayaan Dana Kerja Berprestasi Menengah Wilayah Selain dari Komple UPT Stasion KPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Abstr	75.00	75.00	81.80	100,00	75.00	81.90	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.04	Nilai Perbaikan Monev SAMPT Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Abstr	82.00	82.00	85.81	100,00	82.00	85.90	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.05	Nilai Kinerja Pemenuhan Anggaran Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Abstr	71.00	71.00	82.80	100,00	71.00	82.90	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.06	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Abstr	80.75	80.75	88.41	100,00	80.75	88.41	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.07	Pemenuhan Tercapai BPR Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	100.00	100.00	100.00	100,00	100.00	100.00	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.08	Pemenuhan Sistemasi Hasil Pengawasan Yang Diperseorok Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	80.00	80.00	100.00	100,00	80.00	100.00	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.09	Tingkat Kepuasan Pemangan Berprestasi Berprestasi Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	80.00	80.00	84.34	100,00	80.00	84.34	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											
IKS.03.10	Tingkat Kepuasan BPR Lingkup UPT Stasion KPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Abstr	80.00	80.00	87.58	100,00	80.00	87.58	100,00	02-Jan-2025 15:32
	Tambah Data Dukung											

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2024)

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Sasaran 01 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Sasaran kegiatan yang pertama yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. IKS. 01.01 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel. 3
Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapakan CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk.

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah permohonan masuk dari setiap jenis layanan sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer dibagi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan dari layanan tersebut.

1. A = CBIB

- Permohonan Sertifikat CBIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CBIB Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CBIB : $(A) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

2. B = CPIB

- Permohonan Sertifikat CPIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CPIB Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CPIB : $(B) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

3. C = CPPIB

- Permohonan Sertifikat CPPIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CPPIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CPIB : $(C) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

4. D = CPOIB

- Permohonan Sertifikat CPOIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CPOIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CPOIB : $(D) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

5. E = CDOIB

- Permohonan Sertifikat CDOIB Tahun 2024 = 0
- Sertifikat CDOIB Diterbitkan Tahun 2024 = 0
- Persentase Capaian CDOIB : $(E) = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

6. F = CBIB Kapal

- Permohonan Sertifikat CPIB Kapal Tahun 2024 = 16
- Sertifikat CPIB Kapal Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 16 (Berdasarkan Sertifikat CPIB Kapal Di Lokasi Provinsi Aceh Terlampir)
- Persentase Capaian CPIB Kapal : $(F) = \frac{16}{16} \times 100 \% = 100 \%$

$$\% X = \frac{100+100+100+100+100+100}{6} \times 100\%$$

$$\% X = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 sebesar 100 %. Berdasarkan karakteristik di wilayah kerja UPT SKIPM Aceh kegiatan primer yang telah dilaksanakan tahun 2024 adalah Cara Penangkapan Ikan Yang Baik (CPIB Kapal). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Bidang Perikanan Tangkap yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang melaksanakan kegiatan tersebut pada periode sebelumnya.

Tabel. 4
Data Sertifikat CPIB Kapal Tahun 2024

No	Nomor Sertifikat	Nama Kapal Perikanan	Alamat	Jenis Produk
1	24-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Julisman	Desa Labuhan Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
2	25-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Marliadin	Desa Labuhan Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
3	26-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Safnir	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
4	27-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Epan Sumenda	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
5	28-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Muhammad Rizal	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
6	29-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Farid Hadi	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
7	30-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Kafrudin Afif	Desa Labuhan Jaya Kec. Teupah Selatan	Gurita
8	31-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Rasmanudin	Desa Labuhan Jaya Kec. Teupah Selatan	Gurita
9	32-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Biharmar	Desa Pasir Tinggi Kec. Teupah Selatan	Gurita
10	33-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Miluadi	Desa Pasir Tinggi Kec. Teupah Selatan	Gurita
11	34-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Eri Irawan	Desa Latiung Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
12	35-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Riki Darmawan	Desa Latiung Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
13	36-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Yoyon Tasoma	Desa Latiung Kec. Teupah Selatan	Gurita
14	37-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Indra Gunawan	Desa Badegong Kec. Teupah Selatan	Gurita
15	38-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Yusman	Desa Badegong Kec. Teupah Selatan	Gurita
16	39-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Robika	Desa Badegong Kec. Teupah Selatan	Gurita

Gambar. 6
Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal Tahun 2024



2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru setelah BPPMHKP dibentuk. Berdasarkan data pada aplikasi kinerjajaku, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan efektifitas pelaksanaan sebesar 120 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan oleh SKIPM Aceh dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan update informasi dan referensi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pada masa transisi SOTK sampai dengan saat ini, diharapkan dengan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dan koordinasi dengan stakeholder terkait dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS. Serta terdapat rencana penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.940.724,- atau setara dengan 99,96 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini dengan melaksanakan inspeksi, melakukan pengambilan dan pengujian contoh, dan melaksanakan survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan atau peraturan terkait kepada pengguna jasa, melaksanakan program yang telah direncanakan, koordinasi dan kerjasama antara petugas atau inspektur mutu dan/atau tim pusat serta unit pelaksana teknis eselon I terkait.

2. IKS. 01.02 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual. Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP/SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 5
Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	-	-	70	106,66	120	70	120	70	120

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, rekomendasi HACCP yang diterbitkan di SKIPM Aceh sebanyak 34 produk dari total target tahunan sejumlah 30 rekomendasi pada tahun 2024, yang terdiri dari penerbitan baru dan monev sebagaimana data capaian ruang lingkup HACCP adalah termasuk kegiatan inspeksi dan monev HACCP sebagaimana terlampir.

Tabel. 6
Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk)
SKIPM Aceh Tahun 2024

NO	NOMOR BERTITIKAT HACCP	RUANG LINGKUP	TANGGAL	BERLAKU SAMPAI	GRADU SERTIFIKAT	STATUS	NO	NAMA UPT	ALAMAT
1	085/PMHACORP/03/23	Fresh Cephalopoda	16 Februari 2024		B	Monev	1	CV. King Of Milk Fish	Desa Raja, Kec. Bendakien, Kab. Aceh Tenggara, Aceh-Indonesia
2	115/PMHACORP/03/23	Fresh Demersal Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
3	083/PMHACORP/03/23	Fresh Pelagic Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
4	084/PMHACORP/03/23	Fresh Shrimp	16 Februari 2024		B	Monev			
5	085/PMHACORP/03/23	Fresh Swimming Crab	16 Februari 2024		B	Monev			
6	087/PMHACORP/03/23	Frozen Cephalopoda	16 Februari 2024		B	Monev			
7	117/PMHACORP/03/23	Frozen Demersal Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
8	118/PMHACORP/03/23	Frozen Mollusk	16 Februari 2024		B	Monev			
9	119/PMHACORP/03/23	Frozen Pelagic Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
10	130/PMHACORP/03/23	Frozen Shrimp	16 Februari 2024		B	Monev			
11	131/PMHACORP/03/23	Frozen Soft Shell Crab	16 Februari 2024		B	Monev			
12	040/PMHACORP/04/23	Fresh Pelagic Fish	02 April 2024		C	Monev	2	CV. Fishernary Indo Maimur	Jl. Simpangpanjang No. 15 Ujung, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
13	041/PMHACORP/04/23	Frozen Pelagic Fish	02 April 2024		C	Monev			
14	042/PMHACORP/04/23	Frozen Shrimp	02 April 2024		C	Monev			
15	043/PMHACORP/04/23	Frozen Demersal Fish	02 April 2024		C	Monev			
16	044/PMHACORP/04/23	Frozen Demersal Fish	02 April 2024		C	Monev			
17	008/PMHACORP/05/24	Fresh Demersal Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Tertit Baru	3	PT. Perikanan Indonesia Simelue	Jl. Lelaki Ali Husein TPI, Simelue, Aceh - Indonesia
18	015/PMHACORP/05/24	Fresh Pelagic Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Tertit Baru			
19	009/PMHACORP/05/24	Frozen Cephalopoda	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Tertit Baru			
20	010/PMHACORP/05/24	Frozen Demersal Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Tertit Baru			
21	016/PMHACORP/05/24	Frozen Pelagic Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Tertit Baru			
22	045/PMHACORP/07/24	Fresh Demersal Fish	18 Juli 2024	18 Juli 2025	B	Tertit Baru	4	CV. Kana Cahaya Bahari	Jl. Pinggir Kali Nomor 02, Kel. Panga Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
23	047/PMHACORP/07/24	Frozen Demersal Fish	18 Juli 2024	18 Juli 2025	B	Tertit Baru			
24	048/PMHACORP/07/24	Frozen Lobster	18 Juli 2024	18 Juli 2025	B	Tertit Baru			
25	079/PMHACORP/07/24	Fresh Pelagic Fish	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Tertit Baru			
26	080/PMHACORP/07/24	Fresh Tuna	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Tertit Baru			
27	081/PMHACORP/07/24	Frozen Pelagic Fish	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Tertit Baru			
28	082/PMHACORP/07/24	Frozen Tuna	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Tertit Baru			
29	064/PMHACORP/10/23	Frozen Shrimp			B	Monev	5	PT.Hibi Mina Jaya	Jalan David Darah I,
30	055/PMHACORP/11/24	Fresh Tuna	13-Nov-24	13-Nov-25	B	Tertit Baru	6	CV. Anrak Agam Ayah	Jalan Tangkulu Mubrah,
31	030/PMHACORP/11/24	Fresh Tuna	13-Nov-24	13-Nov-25	B	Tertit Baru	7	PT. Naura Malacca	Jalan Syah Kuala Nomor
32	035/PMHACORP/11/24	Frozen Pelagic Fish	19-Nov-24	19-Nov-25	B	Tertit Baru	8	PT. Yakin Pasia Tana	Korng. RPS Lampulo, Jl.
33	081/PMHACORP/12/23	Frozen Pelagic Fish	28/11/2024	28/11/2025	B	Monev	9	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Jalan Simpangpanjang Ujung No.15 Gempeng Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
34	088/PMHACORP/12/23	Frozen Tuna	28-Nov-24	28/11/2025	B	Monev			

Sedangkan terkait layanan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Produk (SKP), yang menjadi tugas baru yang dilaksanakan oleh SKIPM Aceh Tahun 2024 tercatat terdapat 3 permohonan dan jumlah sertifikat SKP yang diterbitkan sebanyak 3 sertifikat, seperti data dibawah ini.

Tabel. 7
Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk
SKIPM Aceh Tahun 2024

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP
1	CV. Novira Abadi	Jalan T. Nyak Makam Nomor 04, Desa/Kelurahan le Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelagis Beku
2	CV. Novira Abadi	Jalan T. Nyak Makam Nomor 04, Desa/Kelurahan le Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelagis Segar
3	Koperasi Konsumen Sebena PPS Kutaraja	Jalan Sisinga Mangaraja Ujung Komplek PPS Desa/Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Kering

Tabel. 8
Data Sertifikat Kelayakan Produk (SKP)
SKIPM Aceh Tahun 2024

NO	NOMOR SKP	NOMOR PBUMKU	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP	TANGGAL	BERLAKU SAMPAI	PERINGKAT
1	34182/11/SKP/BK/XI/2024	PB-UMKU: 022020020004300030001	CV. Novira Abadi	Jalan T. Nyak Makam Nomor 04, Desa/Kelurahan le Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelagis Beku	4 November 2024	4 November 2026	B
2	34183/11/SKP/SG/XI/2024	PB-UMKU: 022020020004300050001	CV. Novira Abadi	Jalan T. Nyak Makam Nomor 04, Desa/Kelurahan le Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelagis Segar	4 November 2024	4 November 2026	B
3	34772/11/SKP/KR/XII/2024	PB-UMKU: 050624006621900030001	Koperasi Konsumen Sebena PPS Kutaraja	Jalan Sisinga Mangaraja Ujung Komplek PPS Desa/Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Kering	13 Desember 2024	13 Desember 2026	B

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah target atau permohonan dari setiap jenis layanan sertifikasi sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dibagi dengan jumlah sertifikat yang memenuhi persyaratan dan atau diterbitkan dari layanan tersebut. Berikut perhitungan indikator kinerja tersebut :

1. A = HACCP

- Target HACCP Tahun 2024 = 30
- Capaian HACCP Tahun 2024 = 34
- Persentase Capaian HACCP : $(A) = \frac{34}{30} \times 100 \% = 113,33 \%$

2. B = SKP

- Permohonan SKP Tahun 2024 = 3
- SKP Yang Diterbitkan Tahun 2024 = 3
- Persentase Capaian SKP : $(B) = \frac{3}{3} \times 100 \% = 100 \%$

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\% X = \frac{113,33+100}{2} \times 100 \%$$

$$\% X = 106,66 \%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tidak dapat diperbandingkan secara langsung, karena salah satu unsur pembentuk yaitu Sertifikat Kelayakan Produk tahun sebelumnya belum dilaksanakan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah diupayakan sebaik baiknya sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 106,66 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan dukungan pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh melalui anggaran Sertifikasi Produk sebesar Rp. 38.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.037.935,- atau senilai 99,84 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku HACCP dan SKP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak UPI. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini.

Gambar. 7
Kegiatan Inspeksi dan Monitoring Penerapan HACCP di UPI Tahun 2024



3. IKS. 01.03 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan *supplier/miniplant*, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik. Berikut formula perhitungan yang dipergunakan untuk menghitung indikator kinerja persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI :

$$\% X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah kab/kota/yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2024 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan “Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan lokasi pelaksanaan di 2 (dua) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh dengan lokus Pasar Al-Mahirah dan TPI PPS Kutaradja, sedangkan untuk Kabupaten Aceh Besar dengan lokus Pasar Induk Lambaro dan Pasar Keutapang. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester. Berikut target, perhitungan dan realisasi indikator kinerja beserta dokumentasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik SKIPM Aceh Tahun 2024 :

$$\% X = \frac{2}{2} \times 100\% = 100 \%$$

Gambar. 8

**Kegiatan Monitoring Penjaminan Mutu Perikanan Domestik
di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024**



Tabel. 9
Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Persen	-	-	-	-	-	-	70	100	100	70	120	70	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja pada periode sebelumnya menggunakan satuan lokasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan periode tahun 2024. Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerjaku pada tahun 2023, periode yang sama, terdapat capaian 2 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Jika diperbandingkan dengan data tahun 2024 persentase capaian 100 % merupakan capaian di 2 lokasi kabupaten/kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh yang terdapat pada dokumen Renstra telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan efektifitas pelaksanaan sebesar 100 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah sesuai dengan target dan rencana yang telah di tetapkan. Terdapat hasil evaluasi yang mengharuskan SKIPM Aceh melakukan beberapa langkah perbaikan. Perlu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BKIPM Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengendalian Mutu Dlm Rangka Penyediaan Pangan Sehat, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. SKIPM Aceh berusaha dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil tambahan non teknis dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.663.855,- atau setara dengan 91,33 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BKIPM Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengendalian Mutu Dlm Rangka Penyediaan Pangan Sehat, koordinasi dan rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan periode selanjutnya.

4. IKS. 01.04 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Berikut formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 :

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 99 % dan terdapat capaian sebesar 100 %. Berdasarkan Data Ekspor SKIPM Aceh Tahun 2024 Periode Bulan Januari Sampai dengan Desember adalah sebagai berikut :

A = HC yang diterbitkan oleh SKIPM Aceh = 19

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0

$$x = \frac{19 - 0}{19} \times 100 \%$$

$$x = 100 \%$$

Tabel. 10
Data Jumlah Sertifikasi Ekspor Tahun 2024

No	Bulan	Sertifikat /HC (Jumlah)	Rasio Penerimaan			
			HC Terbit		HC Ditolak	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	1	1	100	0	0
2	Februari	1	1	100	0	0
3	Maret	1	1	100	0	0
4	April	-	-	100	0	0
5	Mei	5	5	100	0	0
6	Juni	3	3	100	0	0
7	Juli	3	3	100	0	0
8	Agustus	1	1	100	0	0
9	September	-	-	100	0	0
10	Oktober	1	1	100	0	0
11	November	2	2	100	0	0
12	Desember	1	1	100	0	0
Total / Rata-Rata		19	19	100	0	0

Tabel. 11
Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,11	99	101,11

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja SKIPM Aceh pada periode tahun 2023, terdapat indikator kinerja terkait ekspor yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target sebesar 98 % dan capaian sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra terdapat t indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sebesar 99 % dan capaian sebesar 100 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target sebesar 99 %.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kinerja indikator ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat program penggunaan teknologi atau sistem informasi baru untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekspor.

6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan terkait ekspor diantaranya yaitu Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor dengan pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 3.640.000 atau setara dengan 100 %. Selain itu kegiatan Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impor-nya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.599.264, atau setara dengan 99,99 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan koordinasi lingkup internal BPPMHKP serta melakukan sosialisasi eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait.

Sasaran 02 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Sasaran kegiatan yang kedua yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat satu indikator kinerja sebagai berikut :

5. IKS. 02.01 Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Pada tanggal 2 sampai 3 September 2024 SKIPM Aceh telah melaksanakan re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 bersama Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dan telah menyelesaikan seluruh tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Akreditasi dengan nomor LI-153-IDN yang berlaku sampai dengan 18 November 2029. Dengan tipe lembaga inspeksi tipe A, pada bidang inspeksi dan sub bidang inspeksi: perikanan (surveilans HACCP).

Gambar. 9

Kegiatan Re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 di SKIPM Aceh Tahun 2024



Berikut formula perhitungan indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\% X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Persentase Penerapan ISO 17025

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 12
Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	-	-	70	15	83,10	70	118,71	70	118,71

Pada tahun 2024 Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah melakukan pengukuran lingkup UPT terhadap nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebanyak unit sampling 13 laboratorium dengan capaian nilai sebesar 81,35. Selain itu dilakukan juga pengukuran nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebanyak 14 lembaga inspeksi dengan capaian nilai sebesar 84,85. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, perhitungan nilai capaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT yang dapat dipergunakan oleh Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 menggunakan capaian rata-rata yaitu sebesar 83,10 atau setara dengan 118,71 % dari target sebesar 70 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 terdapat indikator kinerja terkait laboratorium, namun lebih spesifik pada Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Lingkup UPT KIPM Aceh. Sehingga indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah tercapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2024, indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung dengan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji yang memiliki anggaran sebesar Rp. 53.619.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 53.616.762,- atau setara dengan mendekati 100 % dari pagu anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh : pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat, serta mengikuti seluruh tahapan dalam kegiatan dari Komite Akreditasi Nasional.

Sasaran 03 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh

Sasaran kegiatan yang ketiga yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh. Sasaran kegiatan ini secara hirarki berada dibawah koordinasi Sekretariat BPPMHKP. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

6. IKS. 03.01 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Berikut formula yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada periode akhir tahun 2024 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91,44. Capaian nilai tersebut jika dilakukan perhitungan intersepsi diperoleh nilai sebesar 3,66. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan "Sangat Baik". Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Hasil pelaksanaan SKM telah dipublikasikan kepada publik melalui social media. Nilai SKM yang menjadi capaian BPPMHKP pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 94,87, dengan rata rata per unur 3,79. SKIPM Aceh memiliki perolehan yang lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu nilai rata-rata SKM di 47 satuan kerja lingkup BPPMHKP yaitu sebesar 88,30.

Gambar. 10

Capture Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2024



Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Aceh	2024	4	4,67	91,44	12

Tabel. 13
Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh / Indeks	-	-	-	-	-	-	3,36	3,66	108,93	3,36	108,93	3,36	108,93

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data tahun 2023 terkait capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh pada terdapat sedikit penurunan capaian dari nilai 91,67 menjadi sebesar 91,44. Jika dilakukan perbandingan dengan capaian indeks tahun 2024 harus dilakukan perhitungan intersepsi terlebih dahulu.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan. Analisa lebih lanjut telah diupayakan untuk menghindari terjadinya kesalahan input data pada pengisian oleh responden. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat dibandingkan capaian periode sebelumnya. *Human error* dimungkinkan dapat terjadi sebagai keputusan atau perilaku responden yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi performa instansi. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya dengan Badan Karantina Indonesia di Aceh, karena sampai dengan saat ini secara sistem dan proses masih terkait dengan kegiatan pelayanan karantina ikan. Koordinasi harus terus ditingkatkan agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 didukung melalui kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa. Sampai dengan tahun 2024 pagu anggaran terkait indikator kinerja ini tidak dialokasikan secara khusus.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu internalisasi budaya pelayanan prima, *refreshment* peraturan dan sosialisasi kepada pengguna jasa.

7. IKS. 03.02 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan data pada ropeg.kkp.go.id tahun 2024, target dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 86, serta dengan target periode semester I tahun 2024 sebesar 81. Dalam periode tahun 2024 dilakukan perhitungan capaian realisasi kembali melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>, melalui halaman tersebut diperoleh nilai IP ASN SKIPM Aceh sebesar 91,94 atau setara dengan 106,91 %. Capaian nilai tersebut dicapai atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja. Berdasarkan data, SKIPM Aceh mendapatkan indeks dengan kategori sangat tinggi, jika dibandingkan dengan capaian unit pelaksana teknis lainnya di seluruh Indonesia, yaitu menempati urutan ke 3 tertinggi . Capaian indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian level unit eselon I dan kementerian.

Gambar. 11
Capture Nilai IP ASN SKIPM Aceh Tahun 2024



IP ASN 2024

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2023

Aceh

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	STASIUN KIPM ACEH	16	21,31	85,24 %	40	100 %	21,62	85,4 %	5	100 %	91,94	SANGAT TINGGI

<

>

Tabel 14.
Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Indeks	-	81,57	82,36	83,45	89,89	90,34	86	91,94	106,91	86	106,91	86	106,91

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2023 terdapat peningkatan capaian dari nilai 89,89 menjadi 91,94 pada tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh capaian yang telah melebihi target yang harus dicapai sebesar 86.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala SKIPM Aceh berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal dari kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA sebesar Rp. 7.753.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.753.000,- atau besarnya setara dengan 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Aceh serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pada periode selanjutnya.

8. IKS. 03.03 Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Mengacu pada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: penetapan status unit kerja berpredikat Menuju WBK yaitu dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 serta ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja dilingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Perhitungan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 dilaksanakan oleh tim penilai internal secara mandiri yang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan ZI menuju WBK} = \text{Nilai Pengungkit} + \text{Nilai Hasil}$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target senilai 75. Penilaian tahun ini dilakukan secara mandiri dengan pemantauan dari tim penilai dari Tim SDM dan RB BPPMHKP. SKIPM Aceh menjadi salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian dari 5 satuan kerja. Hasil pendampingan dan penilaian mandiri dilaksanakan secara kunjungan langsung ke unit kerja maupun online. Seluruh komponen di SKIPM Aceh berupaya untuk meningkatkan nilai capaian indikator kinerja ini, dengan menjaga konsistensi dan melakukan pembaharuan pemenuhan seluruh data dukung komponen pengungkit dan hasil secara berkala sesuai ketentuan. Berikut rekap hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada tahun 2024 oleh BPPMHKP.

Tabel. 15

Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Lingkup BPPMHKP Pada Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pengungkit	Pemenuhan	Reform	Hasil	Total
1	Stasiun KIPM Aceh	48,58 (80,96%)	24,81 (82,70%)	23,77 (79,23%)	33,41 (83,52%)	81,98
2	Stasiun KIPM Bandung	43,51 (72,52%)	22,35 (74,50%)	21,16 (70,54%)	35,86 (79,37%)	79,37
3	Stasiun KIPM Jambi	47,76 (79,61%)	24,33 (81,10%)	23,43 (78,11%)	35,78 (89,44%)	83,54
4	Stasiun KIPM Padang	45,91 (76,52%)	22,01 (73,38%)	23,90 (79,66%)	37,70 (94,25%)	83,61
5	Stasiun KIPM Palembang	40,60 (67,66%)	17,80 (59,34%)	22,80 (75,99%)	35,05 (87,63%)	75,65

Tabel. 16

Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	66,99	66,99	75	81,98	109,31	75	109,31	75	109,31

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 66,99 sedangkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai menjadi 81,98 atau setara dengan 109,31 % dari target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK adalah sebesar 75. Sampai dengan tahun 2024 capaian indikator Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target pada Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan integritas, peningkatan layanan, peningkatan kinerja serta penciptaan inovasi. Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terus dilakukan pembaharuan oleh seluruh tim.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK, salah satunya dengan penggunaan teknologi untuk mengikuti pelatihan pelatihan terkait.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK didukung oleh anggaran yang terdapat di kelompok dukungan manajemen internal yang mana terdapat sub komponen pemeliharaan integritas telah terealisasi sebesar Rp. 2.860.000,-.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu menciptakan inovasi baru dan memenuhi seluruh unsur penilaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK dan WBBM memiliki beberapa unsur yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

9. IKS. 03.04 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evalusi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 17
Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	87,40	-	-	-	82	85,50	104,27	82	104,27	82	104,27

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sekeretariat BPPMHKP bersama dengan Tim Penilai Internal lingkup KKP melalui LKE yang terdapat pada <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data capaian SAKIP lingkup BPPMHKP, SKIPM Aceh menempati urutan tinggi jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis lainnya di seluruh Indonesia. Berikut tampilan gambar / capture dari penilaian mandiri tersebut.

Gambar. 12

Capture Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh Pada Kinerja KKP Tahun 2024

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1043000000	STASIUN KIPM ACEH LKE Saktur	24.00	27.00	12.00	22.50	85.5	A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja tahun 2023 tidak terdapat target indikator kinerja penilaian mandiri SAKIP sehingga secara pencapaian indikator kinerja ini tidak dapat secara langsung diperbandingkan. Namun terdapat indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja yang secara sistem melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen-dokumen kinerja seluruh unit kerja lingkup BKIPM.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Penilaian mandiri SAKIP telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BKIPM pada tahun 2021. Terdapat unit kerja yang menjadi *sampel* uji petik penilaian SAKIP secara langsung yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal lingkup KKP.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun online secara periodik.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang

husus terkait SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan perencanaan dan penganggaran.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran terkait perencanaan dan penganggaran terpadat pagu anggaran sebesar Rp. 29.014.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai mendekati 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP SKIPM Aceh.

10. IKS. 03.05 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Sedangkan secara manual formula perhitungan indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tampilan dibawah ini :

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS _i	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS _i	: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n	: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

NEf Satker	: Nilai Efektivitas Satker
RVRO _i	: Realisasi Volume RO i
TVRO _i	: Target Volume RO i
n	: Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKA UEI	: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP	: Capaian Indikator Kinerja Program
NEf _{satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{satker}	: Nilai Efisiensi Satker
W _{CIKP}	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEf _{satker}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan penilaian. Nilai kinerja ini diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu yang telah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 92,50 dari target sebesar 71 atau setara dengan 120 %. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian level I sebesar 82, 83 dan level kementerian sebesar 87,17. Berikut tampilan layar nilai kinerja perencanaan anggaran SKIPM Aceh Tahun 2024.

Gambar. 13

Capture Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Aceh Pada Aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2024



Tabel. 18

Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	-	-	71	92,50	120	71	120	71	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang dilakukan secara otomatis perhitungan melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Namun nilai ini tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024. Hal ini karena pendekatan nilai dari indikator ini adalah pada sisi perencanaan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 adalah sebesar 71 dan dapat tercapai melebihi target sebesar 92,50.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai NKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

11. IKS. 03.06 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Hal-hal penting dalam perhitungan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekwensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekwensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - ✓ Semakin rendah frekwensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
 - ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan, khusus triwulan 1 batas pemutakhiran adalah 10 hari kerja bulan Februari
 - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20 %
 - ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
4. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5 %
 - ✓ Dispensi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM yang disampaikan ke KPPN dan telag diterbitkan SP2D nya pada triwulan IV
 - ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target tahunan dengan nilai sebesar 93,76, dan target semester I sebesar 83. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data capaian seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2024, SKIPM Aceh menempati urutan ke 26 (dua puluh enam) dari sejumlah 382 satuan kerja. Berikut ditampilkan tangkap layar, serta tabel target dan realisasi capaian indikator kinerja ini.

Gambar. 14

Capture Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SKIPM Aceh Pada Aplikasi OM SPAN Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ACEH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Mutu DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.21	98.25	0.00	0.00	99.44	100.00	78.73	80%	0.00	96.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	19.65	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.11		98.85				100.00				

Tabel. 19

Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	98,28	97,02	96,17	97,47	97,47	93,76	98,41	104,96	93,76	104,96	93,76	104,96

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada periode tahun 2023 terdapat nilai capaian 97,47. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai capaian menjadi sebesar 98,41.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 2 tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu pada tahun 2022 sebesar 96,17 dan tahun 2023 sebesar 97,47 serta nilai capaian tahun 2024 naik menjadi 98,41.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini merupakan upaya seluruh tim di SKIPM Aceh untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

12. IKS. 03.07 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT..... Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT}} \times 100\%$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Selama tahun 2024 tidak ada audit yang dilaksanakan secara langsung oleh BPK di SKIPM Aceh. Namun telah dilakukan upaya pemenuhan seluruh dokumen serta data dukung sesuai ketentuan secara online. Berdasarkan data BPPMHKP tahun 2024 untuk satuan kerja SKIPM Aceh tidak terdapat temuan BPK. Sehingga capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 persentasenya adalah sebesar 100 %. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini :

Tabel. 20
Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Persen.	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2023 terdapat capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebesar 100 %. Capaian ini sama dengan periode tahun 2024 melalui indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra terbaru indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK telah memenuhi target sebesar 100 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait temuan BPK, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan pemantauan dan evaluasi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja ini dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, yaitu komponen pemantauan dan evaluasi. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 47.046.000,- dengan realisasi tahun 2024 mendekati 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK adalah dengan melakukan pemenuhan seluruh dokumen data dukung atau laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

13. IKS. 03.08 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP secara otomatis. Berikut komponen perhitungan unsur serta tampilan gambar aplikasi SIDAK KKP tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

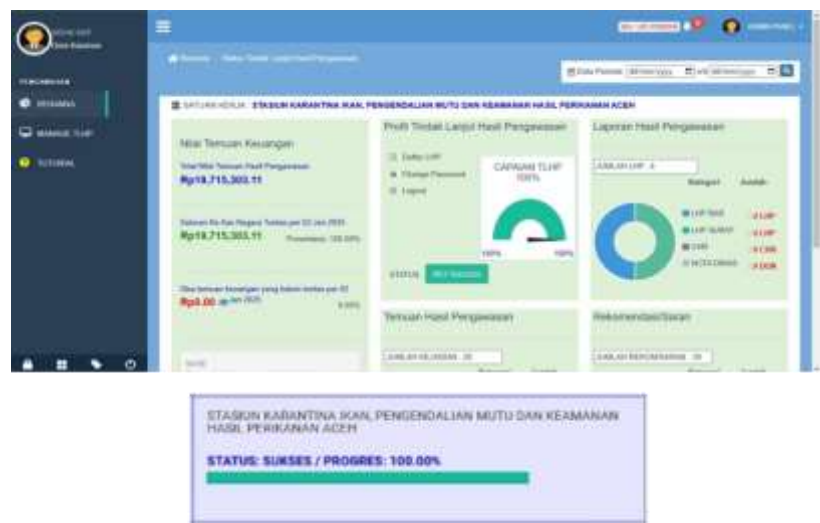
$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi pengawasan audit oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus “SUKSES” dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 80 %, atau setara dengan 120 %. Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tampilan tangkap layar aplikasi SIDAK tahun 2024 ditampilkan sebagai berikut.

Gambar. 15
Capture Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2024



Tabel. 21
Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil PengawasanYang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	100	100	100	100	80	100	120	80	120	80	120

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2023, SKIPM Aceh memiliki capaian kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 75 %. Jika dilakukan perbandingan dengan tahun 2024 capaian tersebut terdapat peningkatan berdasarkan tangkapan layar dari portal SIDAK. Nilai capain tahun 2024 tersebut sama jika dibandingkan capaian nilai pada periode sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 telah terdapat capaian melebihi target, dengan efektifitas capaian sebesar 120 %.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Terdapat 2 (dua) obyek pengawasan pada tahun 2024, yaitu Audit Kinerja dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh tim Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh.. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi Inpektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan.

14. IKS. 03.09 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Indikator kinerja tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2024 indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa mengalami kenaikan target menjadi sebesar 80 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,50. Indikator ini memiliki periode pelaporan secara tahunan dan jenis perhitungan data akumulasi akhir.

1. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP. Penilaian tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP tahun 2024 adalah sebesar 84,34 %. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/jasa stasiun kerja yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 10 %; perencanaan dan persiapan sebesar 13,75 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 10,00 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 31,84 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %. Capaian indikator kinerja ini

Tabel. 22
Target dan Realisasi IKS 03.09 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	76,21	78,26	78,26	80	84,34	105,43	80	105,43	80	105,43

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat target dan capaian karena sistem perhitungan indikator kinerja dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada dokumen Renstra adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun sebelumnya belum ada. Capaian dengan target pada Renstra telah tercapai melebihi target.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatoran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian.

15. IKS. 03.10 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup SKIPM Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN mengalami kenaikan nilai target menjadi 80 % dari tahun sebelumnya sebesar 77,5 %. Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPMHKP dengan nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diperoleh nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satuan kerja lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar 97,50 %, atau setara dengan 120 %.

Tabel. 23
Target dan Realisasi IKS 03.10 Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	97,50	96,57	96,57	80	97,50	120	80	120	80	97,50

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian indikator kinerja, yaitu dari sebesar 96,57, menjadi sebesar 97,50 pada tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada dokumen Renstra adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022. Pada tahun 2024 indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan pengelola BMN terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi SAKTI Modul GLP, Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, yaitu layanan manajemen keuangan. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 49.276.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 49.274.190,- atau setara dengan hampir 100 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

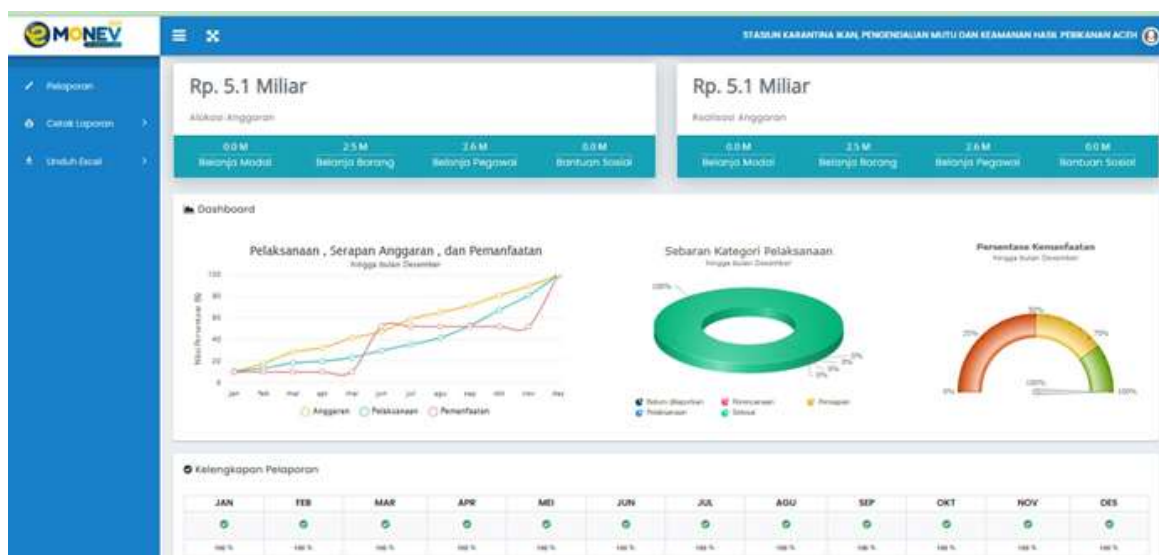
Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN adalah dengan melakukan penertiban administrasi BMN dan melakukan inventarisasi BMN secara berkala. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengelolaan BMN dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja tersebut.

3.3. Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2024 berdasarkan data RKAKL dengan pagu terbaru adalah sebesar Rp. 5.093.642.000,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2024 hingga akhir bulan Desember tahun 2024 terserap sebesar 99,91 %, dengan nilai Rp. Rp. 5.088.935.747,-. Pencapaian atau realisasi ini tentunya adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Selama akhir periode tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran, baik karena realokasi anggaran karantina ikan, *automatic adjustment* maupun karena revisi administrasi. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

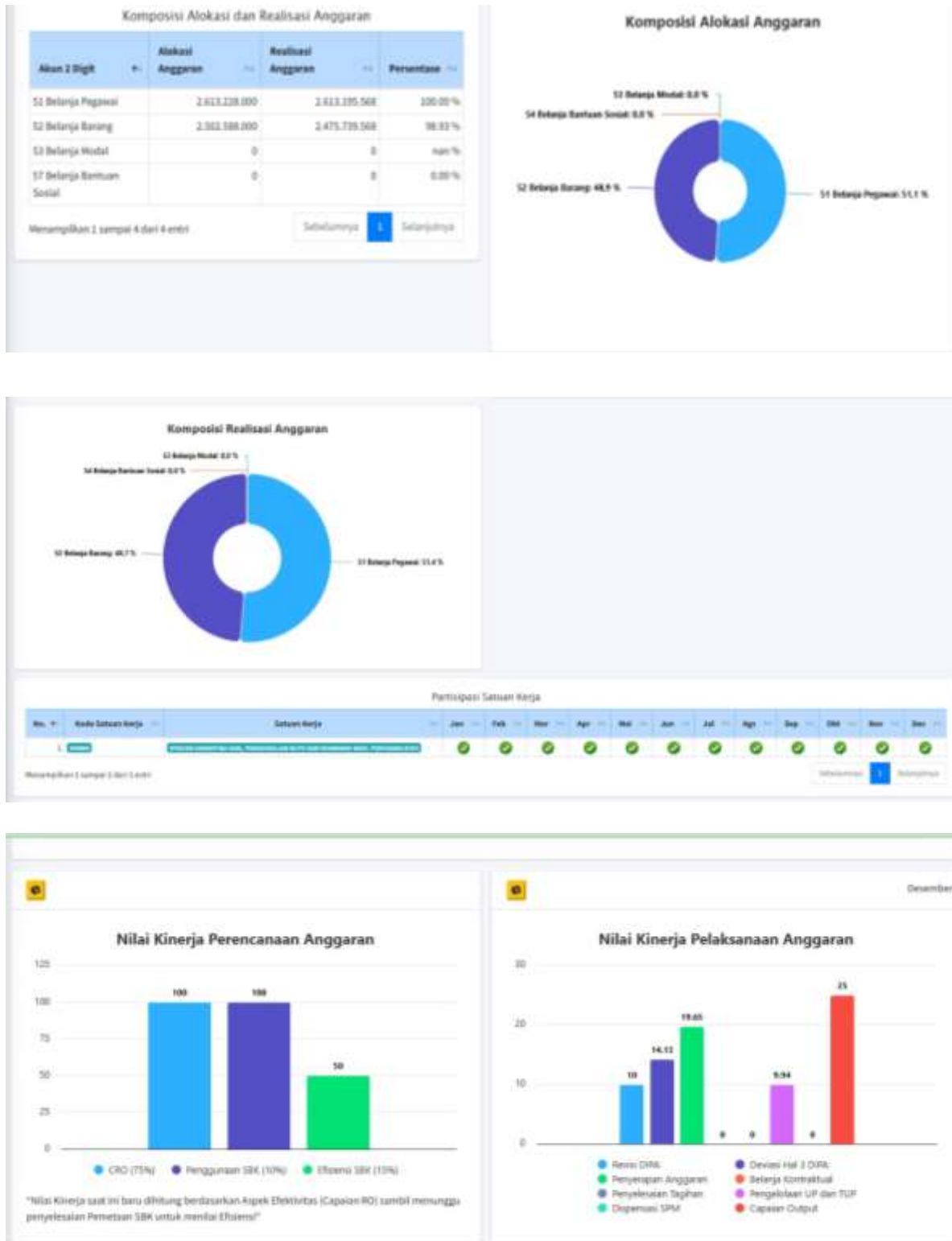
Gambar. 16
Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2024



Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/2024/K8>

Gambar. 17

Komposisi Alokasi, Realisasi, Nilai Kinerja dan Partisipasi Satuan Kerja Tahun 2024



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id>

3.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan September tahun 2024 sebanyak 16 orang PNS dan Non PNS sebanyak 12 orang. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP. Berikut data jumlah pegawai di SKIPM Aceh sampai dengan bulan Desember tahun 2024:

Tabel. 24
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala SKIPM Aceh)	1 Orang
2	Ketua Tim Kerja a. Dukungan Manajemen / Analis Pengelolaan Keuangan APBN b. Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda c. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda d. Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
3	Fungsional Tertentu : a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama b. Asisten Inspektur Mutu c. Pranata Komputer	1 Orang 3 Orang 1 Orang
4	Fungsional Umum a. Analis Mutu Hasil Perikanan b. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Bendahara Pengeluaran d. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian e. Pengelola Layanan Operasional	2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
5	Tenaga Non PNS	12 Orang
Total		28 Orang

Tabel. 25
Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister (S2)	4 Orang
2	Sarjana / Diploma IV (S1/DIV)	8 Orang
3	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4	SLTA / Sederajat	1 Orang

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai salah satu satuan kerja pemerintah, peningkatan pelayanan serta semakin akuntabel terhadap pelaksanaan anggaran merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan. Laporan kinerja ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi peningkatan dalam pencapaian indikator kinerja tiap tahunnya. Stasiun KIPM Aceh terus berupaya melakukan pembenahan dalam internal organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dengan segala upaya yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pengukuran kinerja di SKIPM Aceh dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerja SKIPM Aceh. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Desember Tahun 2024 adalah sebesar 114,61 (kategori : istimewa), dengan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja tercapai melebihi target (persentase 120 %) dan 7 (tujuh) melebihi target (persentase lebih dari 100 %), serta 1 (satu) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target (persentase 100 %). Telah dilakukan upaya dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja SKIPM Aceh dapat terus meningkat di masa yang akan datang dan memenuhi ketentuan SMART.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja SKIPM Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2024 telah tercapai sesuai rencana. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan pada periode berikutnya. Tantangan yang dihadapi SKIPM Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dimana BPPMHKP menjadi Otoritas Kompeten terhadap pemenuhan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi SKIPM Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pemantapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKIPM Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai rencana aksi yang mendukung pencapaian target indikator kinerja.
- Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dengan perencanaan dan monitoring matrik peran hasil dalam pengelolaan kinerja pegawai yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Demikian laporan kinerja SKIPM Aceh tahun 2024 ini dibuat, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.